



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

UNIT KERJA : DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU HARYANTO

2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN**

3. NHK : 726949

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 275.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/80 m2 di KAB / KOTA
 TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 43.750.000

1. MOBIL, CERRY CARRY / ST 100 Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

MOTOR, HONDA ASTREA STAR / C86 CUB Tahun 1988, HASIL
 SENDIRI Rp. 1.750.000

 MOTOR, HONDA CB15A1RRF M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

 MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000

HARTA BERGERAK LAINNYA				Rp.		-
AT BERHARGA				Rp.		
DAN SETARA KAS	KPK	KPK	KPK	Rp.	KPK	V Call
TA LAINNYA				Rp.		
Total	· No.	JOK-	OK	Rp.	318.7	50.000
				Rp.	25.8	310.704
ARTA KEKAYAAN (II	-III)	ah.	al.	Rp.	292.9	939.296
	AT BERHARGA DAN SETARA KAS TA LAINNYA Total	AT BERHARGA DAN SETARA KAS TA LAINNYA Total	AT BERHARGA DAN SETARA KAS TA LAINNYA Total	AT BERHARGA DAN SETARA KAS TA LAINNYA Total	AT BERHARGA Rp. DAN SETARA KAS Rp. TA LAINNYA Rp. Total Rp.	AT BERHARGA Rp. DAN SETARA KAS Rp. TA LAINNYA Rp. Total Rp. 318.7

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id</u>. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara







Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

